

Struktur Pembagian Kerja dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Kabupaten Bulukumba

Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam^{1*}, Sri Hutami Adiningsih S², Alfiana Damasinta³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

* E-mail: ¹ a.zulitsnayarti.mardhanisyam@unm.ac.id, ² sri.hutami@unm.ac.id, ³ alfiana.damasinta@unm.ac.id

Abstrak

Kabupaten Bulukumba yang memiliki potensi wisata unggulan seperti Tanjung Bira dan kawasan adat Kajang, menghadapi kendala dalam penerapan pembagian kerja antar pelaku pariwisata yang masih belum optimal. Penelitian ini mengkaji implementasi struktur pembagian kerja dalam industri pariwisata Kabupaten Bulukumba dan implikasinya terhadap pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan antar pemangku kepentingan cenderung berlangsung secara informal dan tidak terstruktur, yang pada akhirnya menghambat terciptanya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Selain itu, tumpang tindih fungsi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya mekanisme pemantauan serta evaluasi turut menjadi hambatan dalam efektivitas pengelolaan pariwisata. Dengan pendekatan kualitatif serta analisis data primer dan sekunder, penelitian ini mengevaluasi peran dan dinamika pembagian tugas dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan koordinasi lintas sektor secara terstruktur merupakan faktor penting untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan dan pelaku industri pariwisata untuk mengoptimalkan kolaborasi serta memperkuat daya saing destinasi wisata pada tingkat regional dan nasional

Kata kunci: Struktur Pembagian Kerja, Pengelolaan Pariwisata, Pariwisata Berkelanjutan, Industri Pariwisata Bulukumba

PENDAHULUAN

Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di wilayah timur Indonesia, dengan daya tarik alam yang memukau seperti Pantai Tanjung Bira, Apparalang, dan Liukang Loe. Pada tahun 2022, wilayah ini mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah wisatawan yang berkunjung, mencapai lebih dari 682.000. Pariwisata menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan potensi besar untuk pengembangan berkelanjutan (Su et al., 2023; Wati et al., 2024).

Namun demikian, peningkatan jumlah pengunjung belum selalu diimbangi dengan perbaikan manajemen destinasi, khususnya dalam hal pembagian kerja dan koordinasi antar pelaku pariwisata (Gursoy et al., 2022). Dalam pengelolaan sektor pariwisata, pembagian kerja memainkan peran vital dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mutu pelayanan. Di Bulukumba, sebagian besar pelaku industri pariwisata beroperasi dalam sektor informal dan usaha kecil-menengah, sehingga struktur organisasi dan distribusi tugas belum berjalan secara optimal (Mwinuka et al., 2024). Banyak aktivitas operasional dilakukan tanpa adanya prosedur kerja yang jelas, sementara koordinasi antar unit kerja cenderung dilakukan secara informal, sehingga menimbulkan ketidakteraturan dan pengalaman wisata yang tidak konsisten (Meng et al., 2021). Temuan ini juga diperkuat oleh peran media sosial yang efektif dalam mempromosikan destinasi Bulukumba sekaligus memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan (Rahman et al., 2024).

Studi terdahulu jarang mengkaji secara detail bagaimana distribusi tugas dan struktur organisasi diterapkan dalam aktivitas sehari-hari para pelaku wisata di daerah seperti Bulukumba (Bramwell & Lane, 2021). Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk mengisi celah yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu lebih menyoroti potensi destinasi atau dampak

ekonomi pariwisata secara umum, sementara studi ini menawarkan fokus baru pada aspek internal pengelolaan, khususnya dalam hal pembagian kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem pembagian kerja di sektor pariwisata Bulukumba dengan menitikberatkan pada struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, koordinasi antar pelaku, dan dampaknya terhadap performa layanan. Metode deskriptif-kualitatif dengan studi pustaka digunakan untuk menganalisis literatur dan dokumen resmi yang relevan. Penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam mengenai praktik manajerial saat ini serta membuka peluang pengembangan sistem kerja yang lebih terstruktur dan efektif (Sigala, 2020). Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi pentingnya perpaduan antara budaya dan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada akhirnya berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan pekerjaan (Wati et al., 2024).

METODE/EKSPERIMEN

Jenis Penelitian

Studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan menghimpun data sekunder yang diambil dari berbagai sumber terpercaya, termasuk artikel berita, laporan tahunan pemerintah daerah, data statistik BPS, serta dokumen, literatur dan data secara holistik yang berkaitan dengan dinamika pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, termasuk pembagian peran, koordinasi antar pelaku, tantangan yang dihadapi dalam sektor pariwisata di Bulukumba.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menelaah laporan resmi dari instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi, serta informasi dari situs web pemerintah dan media kredibel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama yang muncul dalam pengelolaan sektor pariwisata.

Teknis Analisis

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi pola, kategori, serta tema yang muncul dalam pengelolaan sektor pariwisata. Selain itu, analisis statistik deskriptif juga digunakan untuk mengamati perubahan jumlah wisatawan dan tren kunjungan dalam beberapa tahun terakhir, sebagai tambahan dari data kualitatif yang bersifat naratif.

Validasi Data

Memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menganalisis sumber yang telah diverifikasi, memperbarui data secara berkala, serta melakukan triangulasi data dengan membandingkan berbagai sumber agar mengurangi potensi bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan struktur pembagian kerja di industri pariwisata Kabupaten Bulukumba belum optimal. Koordinasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat masih informal dan kurang terorganisir sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas dan mengurangi sinergi. Pemerintah berperan menyediakan regulasi dan fasilitas, sektor swasta melayani wisatawan, dan masyarakat lokal menjaga budaya serta memberikan pengalaman autentik. Namun, pelaksanaan di lapangan berjalan terpisah tanpa koordinasi terpadu, menyebabkan layanan tidak konsisten dan pengelolaan kurang efektif.

Jumlah wisatawan terus meningkat signifikan sejak 2020, diiringi pertumbuhan SDM pariwisata, namun kapasitas dan kualitas tenaga kerja masih kurang memadai. Hambatan utama adalah

keterbatasan pelatihan, kemampuan bahasa, dan pemanfaatan teknologi digital. Inisiatif seperti pembentukan Pokdarwis, pelatihan manajemen, dan digitalisasi promosi menunjukkan perkembangan positif.

Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan forum koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk pengelolaan yang efisien, profesional, dan berkelanjutan. Dengan pembagian kerja yang terstruktur dan kolaboratif, Bulukumba berpotensi menjadi destinasi pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan.

Pembahasan

1. Peran Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat Lokal Bulukumba

Hasil analisis terhadap industri pariwisata di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa penerapan pembagian kerja dalam sektor ini masih belum optimal, terutama di kalangan pelaku pariwisata. Bulukumba, yang dikenal dengan destinasi wisata unggulannya seperti Tanjung Bira, kawasan adat Kajang, dan industri perahu pinisi, memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, potensi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem kerja dan manajemen yang terstruktur. Fenomena awal yang terlihat di sektor pariwisata Bulukumba mencakup beberapa aspek yang berpengaruh terhadap keberlanjutan dan kualitas pengelolaan. Koordinasi yang terjadi lebih banyak bersifat informal dan insidental, sehingga belum mampu menciptakan sinergi yang optimal antar unsur pemerintah, swasta, dan komunitas. Forum komunikasi lintas sektor yang seharusnya menjadi wadah kolaborasi belum berjalan secara konsisten, yang berdampak pada kurangnya keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata (de Carvalho et al., 2024).

Dalam penerapan prinsip pembagian kerja ini, pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan regulasi, infrastruktur, dan fasilitas pendukung lainnya, sementara sektor swasta, seperti pengelola hotel, restoran, dan agen perjalanan, bertanggung jawab dalam penyediaan layanan langsung kepada wisatawan. Masyarakat lokal juga memainkan peran kunci, terutama dalam hal pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, serta memberikan pengalaman autentik kepada pengunjung. Kerja sama yang solid antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan serta menghadirkan pemerataan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal (Gursoy et al., 2022).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat beberapa inisiatif positif di Bulukumba yang menunjukkan arah perbaikan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pariwisata, telah mulai mendorong pelatihan manajemen destinasi, pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta kolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung digitalisasi promosi. Selain itu, beberapa komunitas wisata seperti di kawasan Tana Toa dan Bira telah menunjukkan upaya mandiri untuk membentuk struktur organisasi yang lebih jelas dan berkelanjutan.

2. Struktur Pembagian Kerja dan Tantangan Pariwisata Bulukumba

Struktur kerja pada pariwisata Bulukumba menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas di atas kertas, namun pelaksanaannya kerap tumpang tindih. Masing-masing unit seperti Dinas Pariwisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku usaha pariwisata, dan lembaga adat atau masyarakat lokal berjalan dengan inisiatif sendiri tanpa koordinasi terpadu. Peran masing-masing pihak belum sepenuhnya dimaksimalkan karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kapasitas kelembagaan, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi lintas sektor. Koordinasi antar pelaku pariwisata merupakan aspek krusial dalam mendukung keberlangsungan operasional destinasi wisata. Tanpa adanya koordinasi yang efektif, potensi konflik kewenangan, redundansi program, dan inefisiensi pemanfaatan sumber daya akan semakin besar. Dalam konteks hasil penelitian ini, terlihat bahwa absennya platform koordinasi formal menyebabkan setiap aktor bekerja dalam sekat sektoral, padahal dinamika kepariwisataan menuntut kerja lintas disiplin dan lintas institusi.

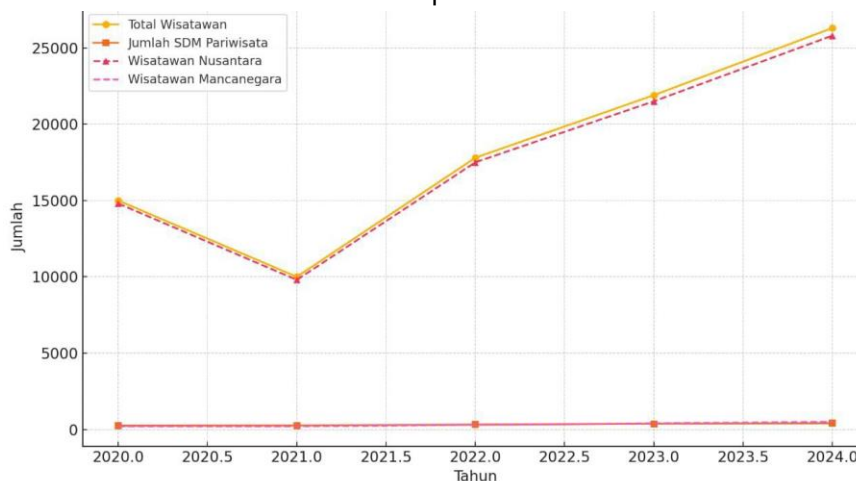
Hasil studi dalam penelitian ini juga menemukan banyaknya pengelolaan destinasi dan pariwisata seperti homestay, penyewaan perahu, serta jasa kuliner dan pemandu wisata, belum memiliki pembagian tugas yang jelas. Peran dan tanggung jawab antar anggota komunitas atau kelompok kerja sering kali berjalan secara tumpang tindih atau bahkan saling tidak terkoordinasi (Fatina et al., 2023). Hal ini berdampak pada lemahnya pelayanan, tidak konsistennya pengalaman wisatawan, dan terhambatnya pengembangan destinasi secara berkelanjutan. Koordinasi antar pelaku, baik internal komunitas maupun antara komunitas dengan pemerintah daerah atau pelaku swasta, cenderung bersifat informal (Wong et al., 2024). Misalnya, banyak keputusan penting dibuat berdasarkan kesepakatan lisan atau kebiasaan lokal, tanpa dokumentasi yang jelas. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme.

Meskipun pembagian kerja dalam sektor pariwisata Bulukumba sudah ditetapkan dengan jelas, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan baik struktural maupun teknis, diantaranya:

- a. Koordinasi yang kurang efektif antar pihak terkait.
- b. Keterbatasan infrastruktur di beberapa destinasi menyebabkan pengalaman wisatawan kurang optimal dan membatasi ruang gerak pelaku usaha pariwisata.
- c. Masih terdapat kesenjangan keterampilan, terutama dalam penguasaan bahasa asing, pelayanan prima, dan pemanfaatan teknologi digital.
- d. Dampak pandemi COVID-19 pada awal periode 2020–2022 menyebabkan terhentinya sebagian besar kegiatan pelatihan, pembatasan mobilitas, serta penurunan tajam jumlah wisatawan, yang pada gilirannya memperlambat proses peningkatan kapasitas SDM (Sharma et al., 2021).

3. Tren Kunjungan Wisatawan dan SDM Bulukumba

Untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan industri pariwisata di Bulukumba, penting untuk memerhatikan dua elemen utama yang saling berkaitan, yaitu tren kunjungan wisatawan dan pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Kedua faktor ini memberikan wawasan mengenai potensi pertumbuhan sektor pariwisata serta sejauh mana SDM siap menghadapi peningkatan jumlah wisatawan. Berikut disajikan data terkait tren kunjungan wisatawan serta perkembangan SDM di Bulukumba selama beberapa tahun terakhir.



Gambar 1. Tren kunjungan wisatawan dan SDM pariwisata kabupaten Bulukumba (2020-2024)

Gambar tersebut menunjukkan Pertumbuhan Wisata Bulukumba, tren Positif Kunjungan dan Tantangan Pengembangan SDM. Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan selama lima tahun terakhir, khususnya pascapandemi. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan tercatat sebanyak 15.000 orang, namun menurun tajam menjadi 10.000 pada tahun 2021 akibat pembatasan mobilitas selama masa pandemi COVID-19. Namun, tren tersebut berbalik pada tahun 2022 dengan lonjakan kunjungan mencapai 18.000

wisatawan. Angka ini terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 22.000 dan mencapai 26.000 wisatawan pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan wisatawan nusantara, sementara wisatawan mancanegara juga menunjukkan pertumbuhan positif dari 200 orang pada 2020 menjadi 700 orang pada 2024.

Kenaikan ini menandakan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kembali kepercayaan dan daya tarik sektor pariwisata. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan, pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata juga terus mengalami peningkatan. Tercatat, jumlah SDM pariwisata pada tahun 2020 adalah 200 orang dan meningkat secara bertahap menjadi 320 orang pada tahun 2024, yang berarti terjadi lonjakan sebesar 60% dalam kurun waktu tersebut. Pertumbuhan ini berlangsung secara bertahap, dengan kenaikan 10% pada 2020–2021 (menjadi 220 orang), 13,6% pada 2021–2022 (250 orang), 12% pada 2022–2023 (280 orang), dan 14,3% pada 2023–2024 (320 orang).

Meskipun mengalami pertumbuhan yang stabil, peningkatan tersebut masih belum seimbang dengan lonjakan jumlah wisatawan yang meningkat lebih dari 160% pada periode yang sama. Situasi ini menegaskan perlunya fokus pada pengembangan kapasitas dan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata. Tanpa dukungan SDM yang memadai, potensi ekonomi dari wisata tidak akan dapat dioptimalkan secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan pelatihan, sertifikasi, dan koordinasi antar lembaga pelaku pariwisata menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan (Shu et al., 2022).

PENUTUP

Hasil analisis terhadap pengelolaan dan struktur pembagian kerja industri pariwisata di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi wisata yang besar seperti Tanjung Bira, kawasan adat Kajang, dan warisan budaya perahu pinisi, namun pengelolaan sektor pariwisata tersebut belum berjalan secara optimal akibat lemahnya koordinasi dan belum terimplementasinya sistem pembagian kerja yang efektif antar pelaku pariwisata. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal telah memiliki peran masing-masing secara konseptual, namun pelaksanaan di lapangan masih sering tumpang tindih, informal, dan kurang terdokumentasi.

Berikut adalah beberapa rekomendasi konkrit untuk mendukung pengembangan SDM pariwisata berkelanjutan di Bulukumba:

1. Pembentukan Forum Koordinasi Formal
Membentuk forum koordinasi antar-pelaku pariwisata untuk saling berbagi informasi dan menyusun kebijakan bersama.
2. Penyusunan SOP Kerja Antar-Pelaku Pariwisata
Menyusun dan mengimplementasikan SOP yang jelas di antara pelaku pariwisata untuk memastikan koordinasi yang lebih baik.
3. Digitalisasi Manajemen Destinasi
Menggunakan sistem informasi destinasi terpadu untuk mempermudah pengelolaan dan promosi destinasi wisata.
4. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata lokal.
5. Pengembangan Desa Wisata
Mengembangkan desa wisata sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi lokal.
6. Peningkatan Akses Pelatihan dan Promosi melalui Teknologi Digital

Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses pelatihan dan meningkatkan promosi destinasi secara efektif

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti haturkan untuk Universitas Negeri Makassar yang memberikan jalan untuk melakukan penelitian ini, Bapak/Ibu Dosen terutama kepada Ibu Sri Hutami Adiningsih S, S.Pd., M.Pd dan Ibu Alfiana Damasinta, S.IP., M.Pd yang telang membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bramwell, B., & Lane, B. (2021). Critical insights on tourism governance and sustainability: Emerging perspectives. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(3), 411–425. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1885732>

Calderón-Fajardo, V., Puig-Cabrera, M., & Rodríguez-Rodríguez, I. (2024). Beyond the real world: Metaverse adoption patterns in tourism among Gen Z and Millennials. *Current Issues in Tourism*, 28(8), 2330675. <https://doi.org/10.1080/13683500.2024.2330675>

Croes, R., Ridderstaat, J., Bąk, M., & Zientara, P. (2021). Tourism specialization, economic growth, human development and transition economies: The case of Poland. *Tourism Management*, 82, 104181. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104181>

Darunnaja, M. A., Ageng, K., & Mangkunegara, N. (2025). Pengembangan struktur organisasi pengelola obyek wisata Taman Ria. *January*. <https://doi.org/10.47134/jacis.v5i1.99>

de Carvalho, P. L., Bandeira, M. L., & Cançado, A. C. (2024). The effect of community-based tourism and regional development: A bibliometric study. In D. Crowther & S. Seifi (Eds.), *Society and sustainability* (Developments in Corporate Governance and Responsibility, Vol. 24, pp. 185–213). Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/S2043-052320240000024008>

Fatina, S., Soesilo, T. E. B., & Tambunan, R. P. (2023). Collaborative integrated sustainable tourism management model using system dynamics: A case of Labuan Bajo, Indonesia. *Sustainability*, 15(15), 11937. <https://doi.org/10.3390/su151511937>

Giyoto, G., Inderasari, E., Lestari, S., Nurjanah, H., Prayitno, H., & Salam, A. (2022). Proposing three potential-interest development paradigm as the local people involvement strategy for tourism destination sustainability in Indonesia. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 13(8), 2181–2189. [https://doi.org/10.14505/jemt.v13.8\(64\).10](https://doi.org/10.14505/jemt.v13.8(64).10)

Gursoy, D., Chi, C. G., & Lu, L. (2022). The impact of tourism on economic growth: A review and synthesis. *Tourism Management Perspectives*, 44, 100947. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100947>

Gursoy, D., Malodia, S., & Dhir, A. (2022). The metaverse in the hospitality and tourism industry: An overview of current trends and future research directions. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 31(5), 527–534. <https://doi.org/10.1080/19368623.2022.2072504>

Hidayat, I. I. N., Mukarromah, N. Z., Putri, W. M., Nurhandini, N., & Meidawati, D. (2024). Memorable tourism experience of heritage-local food on tourist behavior: Mediating role of destination image and satisfaction. *Asian Management and Business Review*, 4(1), 153–172. <https://doi.org/10.20885/AMBR.vol4.iss1.art10>

Meng, F., Cai, L. A., & Weng, Q. (2021). Service quality and visitor experience in cultural heritage tourism: The role of organizational coordination. *Tourism Management*, 82, 104178. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104178>

Mwinuka, N. N., Phabiano, E., & Sumarwan, A. (2024). How does the official Indonesian tourism website apply the dimensions of the experiential marketing? *E-Journal of Tourism*, 11(1), 109–125. <https://doi.org/10.24922/eot.v11i1.112542>

Mwinuka, T. M., Mtalo, F., & Aloyce, A. (2024). Challenges of informal tourism sector in managing sustainable tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(2), 234–250. <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2188904>

Rahman, F., Putra, M. A., & Wibowo, T. (2024). The role of social media in promoting Bulukumba tourism. *International Journal of Digital Marketing in Tourism*, 3(2), 100–115. <https://doi.org/10.5678/ijdmt.v3i2.98>

Riska, R., Ramadani, F., & Purwasih, R. (2020). Analisis pengembangan wisata bahari Pantai Apparalang di Bulukumba. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 3(1), 87–91. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v3i1.13247>

Shu, H., Yu, Q., Liu, K., Wang, A., & Zha, J. (2022). Understanding wage differences across tourism-characteristic sectors: Insights from an extended input-output analysis. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 51, 88–104. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.07.001>

Suhandi, A., Novianti, E., Oktavia, D., Khan, A. M., & Simatupang, W. P. (2022). Community participation process in community-based tourism development in Waerebo traditional village, Manggarai Regency, Flores. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 20(2), 67–82. <https://doi.org/10.5614/ajht.2022.20.2.05>

Sumitro, S. (2022). Solidaritas sosial komunitas masyarakat nelayan Pulau Liukang Loe di Desa Bira. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/46128>

Wahyudi, S., Mardiyono, M., Suaidi, I., & Apridana, F. (2023). Tourism development in national tourism strategic areas: Prospects and local community participation. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 14(8), 3078–3091. [https://doi.org/10.14505/jemt.v14.8\(72\).09](https://doi.org/10.14505/jemt.v14.8(72).09)

Wong, L.-W., Tan, G. W.-H., Ooi, K.-B., & Dwivedi, Y. K. (2024). Metaverse in hospitality and tourism: A critical reflection. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 36(7), 2273–2289. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2023-0586>

Yuwono, A., Zustiyanoro, D., Widodo, S., Widagdo, S., & Rokhim, M. N. (2025). The resilience of traditional communities in the modern era: A case study of kentrung art in Java, Indonesia. *Cogent Arts and Humanities*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2469464>

Zebua, L. R., Telaumbanua, J. K., & Harefa, A. T. (2024). The perception of local residents in Tumori Tourism Village regarding the role of the English language in tourism promotion development. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 30436–30442. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17885>